

# PENYEMPURNAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2002

[ Awaloedin Djamin ]

## I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan permintaan Koordinator Staf Ahli KAPOLRI dalam suratnya No. Pol. B/Und-115/II/2002/SAHLI. untuk memberikan sumbangan pemikiran, pendapat, masukan, saran tentang "Organisasi dan Tata kerja Kepolisian Negara RI" dengan memperhatikan:
  1. Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 Perubahan Kedua
  2. UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
  3. Visi dan Misi Polri
  4. Kebijakan dan Strategi KAPOLRI tahun 2002 - 2004 yang terkait organisasi dan manajemen antara lain :
    - a. Prinsip organisasi yang hemat struktur dan kaya fungsi;
    - b. Pembangunan kekuatan Polri yang modern dan profesional diarahkan pada 2 jenis penampilan tugas operasional, yakni Polisi Berseragam (*uniformed Police*) dan Polisi tidak Berseragam (*ununiformed Police/Plain Clothed Police*) serta tugas auxiliary/pendukung (pengurusan administrasi personil, logistik dan keuangan, pendidikan dan latihan);
    - c. Adanya pembantu utama KAPOLRI yang mempunyai tugas, fungsi dan peran melakukan koordinasi dan pengendalian dalam menindaklanjuti kebijakan KAPOLRI;
    - d. Struktur Organisasi Polda sampai dengan Polsek disuatu propinsi tidak harus sama dengan di propinsi lainnya. disesuaikan dengan kebutuhan tugas berdasarkan kondisi wilayah.
2. Selanjutnya Korsahli menyatakan "Sehubungan hal tersebut di atas untuk bahan kajian, disampaikan foto copy:
  - a. Keppres RI No. 54 Tahun 2002. Tanggal 25 April 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara RI.
  - b. Keputusan KAPOLRI Nomor: Pol Kep 9/V/2001. Tanggal 25 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri;

c. Keputusan Pangab Nomor: Kep/VI/1997. Tanggal 7 Juli 1997 tentang Penyempurnaan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Polri;

d. Keputusan Pangab Nomor Kep/11/X/1992. Tanggal Oktober 1992. Tentang Penyempurnaan Pokok-pokok organisasi dan Prosedur Kepolisian Negara RI.

## II. BEBERAPA PEDOMAN DALAM PENYEMPURNAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

1. Teori organisasi (*organization theory*) telah berkembang sejak lama sekali. dan Max Weber. H. Fayol. F. Taylor, MP Follet. E. Mayo dan sebagainya sampai sekarang (lihat *Organization Theory*.ed.by DS Pugh). DS Pugh menyatakan:

*"Organization theory is the body of thinking and writing which addresses itself to the problem of how to organize". More specifically, organization theory can be defined as the study of the structure and performance of organization and the behaviour of groups and individuals within them".*

2. Model Tradisional, seperti Weber, Fayol dan Taylor melahirkan prinsip-prinsip organisasi yang dianggap universal; seperti *division of work, authority, unity of command, span of control, scalar chain (line of*

*authority), order, stability of tenure of personnel* dan sebagainya;

3. Model Perilaku manusia (*behaviour model*), mengutamakan sifat dan perilaku manusia dalam organisasi. Pendekatan kemudian memperhatikan kedua-duanya, disebut "*middle ground approach*" (Pffifner & Sherwood). Mintzberg menitik beratkan perhatiannya pada "*structuring of organization*"; yang bagi organisasi besar dibaginya dalam "*strategic apex*", yaitu kantor pusat (seperti Mabes Polri), *middle line* (dapat diumpamakan Polda-Polda) dan tingkat pelaksanaan di lapangan (dapat diumpamakan Polres-Polres). Pada tingkat pusat (*strategic apex*) terdapat pejabat-pejabat yang bertanggungjawab menyeluruh dari organisasi. Kepala (umpama KAPOLRI) dan lain-lain pejabat pembantunya (*top level managers*) memusatkan perhatian mereka pada global menyeluruh. Dalam kelompok ini termasuk mereka yang memberi dukungan langsung pada pimpinan dan top manager lainnya, seperti para sekretaris, staff pribadi dan sebagainya. Mintzberg mengatakan: "*The strategic apex is charged with the ensuring that the organization serve its mission in an effective way and also that it serve the needs of those people who control or*

*otherwise have power over the organization*" (bagi KAPOLRI adalah Presiden dan DPR);

4. Istilah "*administration*" mencakup "*organization and management*". *Organization* adalah anatomi (*formal organization structure*) dan manajemen adalah *physiology* dari *administration* (dinamis). Setiap organisasi besar dan kompleks (seperti Polri) merupakan suatu: "*total administrative system*", yang harus dilihat secara keseluruhan, termasuk *sub-system* dan *sub-sub system*nya. Jadi, semua usaha perbaikan, perubahan dan penyempurnaan suatu *administrative system* harus terlebih dahulu memperhatikan seluruh system, untuk mengetahui mana yang perlu diperbaiki, dirubah atau disempurnakan (seperti *check up* dalam kesehatan, untuk kemudian diagnose yang tepat agar terapinya benar-benar tepat). Bila ini tidak dilakukan, hasilnya bukan perbaikan, tapi dapat menimbulkan persoalan baru. Diperkirakan, keluarnya Keppres No. 54, tahun 2001, yang mengganti Keputusan Pangab Nomor 10/VII/1997, kurang memperhatikan hal tersebut di atas. karenanya perlu disempurnakan lagi.
5. Keputusan Pangab Nomor: 11 X 1992 yang menyatakan Polri tingkat Mabes harus menganut "*directory system*".

Merubah "*general staff system*" sebelumnya, hanya diberlakukan bagi AL, AU dan Polri. sedangkan AD tetap mempertahankan "*general staff system*" dengan adanya WAKASAD (bintang 3) dan semua asisten bintang 2 merupakan Staf Umum. Akibat keputusan Pangab ini. Mabes Polri. hanya memiliki 4 Pati bintang 2, yaitu Asrena, Irjen dan 2 Deputi, sedangkan di lapangan terdapat 8 Pati bintang 2, yaitu AKPOL, PTIK, SESPIM, 4 KAPOLDA Jawa dan Asbimmas Mabes ABRI. Keadaan ini menyukarkan mutasi antara Mabes Polri dan lapangan. bagi pejabat-pejabat yang sama *nivellering* dan pangkatnya.

6. Atas usaha Kapolri Diby Widodo. Keputusan Pangab Nomor: 11,8/1992 dirubah dengan Keputusan Pangab Nomor 10/VII/1997. yaitu kembali ke "*general staff system*", yang agak aneh ialah menempatkan Asrena di luar Staf Umum (dalam Organisasi terdahulu (sebelum 1992 dalam staf umum termasuk ASRENA. Mungkin karena sudah tidak berpengalaman lagi dalam "*Sistem Staf Umum*" yang seharusnya membantu Kapolri dengan "*completed staffwork*". Kapolri Bimantoro menyatakan kepada penulis, latar belakang dibuatnya Keppres 54, tahun 2001 karena ia "*pusing*" tiap hari harus menenima 30 Staf Mabes, baik

Asisten, Dir-Dir, Dan Kor, dan sebagainya, ini karena anggota Staf Umum tidak *integrated* dan masing-masing langsung ke Kapolri;

7. Kabarnya Keppres 54, 2001, pembuatannya dikonsultasikan dengan Staf Menpan, yang rupanya kurang mengerti ruang lingkup, organisasi dan manajemen Polri (sistem administrasi Kepolisian RI), dengan antara lain mengadakan jabatan Sekretaris Jendral Polri (yaitu yang merupakan Pola bagi organisasi Departemen). Jabatan Wakapolri dihapus. Diadakan 6 jabatan Pati bintang 3 (yang belum pernah dalam sejarah organisasi Polri), yaitu Sekjen Polri, Irjen Polri dan 4 Deputi Kapolri. Bila dalam Keputusan Pangab Nomor 1/11/8/1992. terdapat hanya 4 jabatan Pati bintang 2 di Mabes, yang telah menyukarkan mutasi antar Pati bintang 2 Mabes dan lapangan, maka Keppres 54, 2001 adalah ekstremnya, yaitu 6 Pati bintang 3 di Mabes dan tidak ada satupun di lapangan (Ketua BKNN dan sekarang tugas Inspektur Lemhannas yang keduanya di luar struktur organisasi Polri). Andaikata keenam Pati bintang 5 (tambah 2) belum memasuki usia pensiun, Kapolri tidak mungkin mengadakan mutasi mereka dengan lapangan, ini juga berarti sukar untuk mengadakan penyempurnaan organisasi seperti yang diusahakan sekarang.

Andaikata Keppres 54, 2001 mengikuti organisasi Departemen yang terdiri atas Menteri, Sekjen, Irjen dan Dirjen-Dirjen. dimana para Dirjen adalah pelaksana tugas pokok Departemen, maka dan keempat Deputi Kapolri, hanya Deputi Operasi yang melaksanakan tugas pokok, sedangkan ketiga Deputi lainnya adalah merupakan unsur pendukung yaitu logistik, SDM dan Diklat. ini pun agak aneh secara universal, karena personil atau SDM merupakan sub-system dari sistim administrasi kepolisian, sedangkan diklat adalah sub-sub system dan sub sistim manajemen personil SDM.

8. Oleh karena itu dalam usaha penyempurnaan organisasi dan tata kerja Mabes. harus diperhitungkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Kapolri sebagai pimpinan puncak dan "*strategic apex*", yang membawahi Mabes Polri, 26 Polda (secara hierarkis), Polwil (Jawa dan propinsi baru), 289 Polres dan 3.376 Polsek. Semua pejabat di Mabes adalah pembantu Kapolri dalam memimpin seluruh jajaran Polri. Struktur Organisasi Polda harus disesuaikan dengan beban kerja sebagai perantara antara Mabes dan Polres-Polres (*middle line*), sedangkan kekuatan dan fungsi Polisi ada di Polres dan Polsek (Kapolro pada DPR Koran Tempo tanggal 30 Januari

2002). Polres adalah Kesatuan Operasional Dasar (KOD) atau *Basic Police Unit*. Beban tugas Polda diatur dalam penentuan Tipe Polda A dan B (nanti mungkin tipe C untuk propinsi baru). Dan 26 Polda dewasa ini terdapat 9 Polda tipe A dan 17 Polda tipe B. ini harus diperhitungkan dalam menyusun struktur organisasi Polda-Polda.

### III. MENYUSUN ORGANISASI DAN TATA KERJA BARU

1. Setelah menguraikan perkembangan organisasi Polri, semenjak tahun 1992, dalam usaha menyempurnakan organisasi yang terakhir, yaitu Keppres No. 54 2001 yang masih berlaku sekarang secara formal, maka untuk tidak mengulangi kekeliruan, maka baik diquote lagi Mintzberg yang mengatakan :

*"Every organized human activity - from making of pots to placing of man on the moon - give rise to two fundamental and opposing requirements the division of labor into various tasks to be performed and the coordination of these tasks to accomplish the activity. The structure of an organization can be defined simply as the sunz total of the ways in which it divides its labor into distinct tasks and iii en achieve coordination among them".*

Polri sebagai organisasi besar dan

kompleks pembagian tugas tersebut tidak hanya mencakupi intern Markas Besar, tapi juga Polda-Polda, Polwil-Polwil, Polres-Polres, Polsek-Polsek sampai Pospol-Pospol. Untuk melaksanakan tugas pokok Polri (pasal 13 UU No.2 2002). yaitu:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. menegakkan hukum
- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Maka tugas pokok tersebut harus diperinci. kedalam fungsi-fungsi utama (operasional) yang dapat dikatakan universal pada kepolisian di dunia yaitu, represif, preventif dan preventif tidak langsung (dulu disebut Pembinaan Masyarakat. sekarang juga disebut pre-emptif) (lihat bagan 1).

Fungsi-fungsi utama tersebut diperinci ke dalam fungsi-fungsi teknis operasional kepolisian, seperti intelpol (sekarang intelkam), Reserse, Sabhara (*general duty police*), Polantas, Brimob, Bimmas. Fungsi-fungsi teknis diwadahkan dalam struktur organisasi menjadi unit-unit, seperti Intelpol, Koserse, Samapta, Polantas, Brimob dan Bimmas. Tidak mungkin fungsi-fungsi operasional terlaksana secara berhasil guna dan berdaya guna tanpa dukungan fungsi pembinaan (*administrative support*).

Kapolri Da'i Bachtiar menyebutnya *auxiliary* yang umumnya mencakupi pengorganisasian (*organizing*), manajemen personil atau SDM, hubungan dan tata cara kerja, manajemen materil-logistik, manajemen keuangan, manajemen pengawasan, serta manajemen perencanaan, pemograman dan penganggaran, (lihat bagan 2). Fungsi-fungsi teknis pembinaan inipun diwadahi dalam struktur organisasi Manajemen pendidikan dan latihan adalah bagian integral dari manajemen personil/SDM (sebagai sub-system. Walaupun karena beban kerjanya, dalam struktur organisasi dapat dibuat tersendiri (lihat bagan 3)

2. Seperti dikatakan *Mintzberg* terdahulu, karena Polri adalah kepolisian nasional yang mencakupi seluruh wilayah RI. maka perlu pemhagian tugas antara Mabes, Polda, Polwil, Polres dan Polsek secara hirarkis (pasal 10 UU No. 2/2001) yang semuanya merupakan satu kesatuan (pasal 5 ayat 2 UU No. 2 2001) (lihat bagan 4). Di puncak piramid hirarki berada Kapolri sebagai pimpinan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan semua fungsi kepolisian kepada Presiden (UU No. 2/2002). Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut. Kapolri dibantu oleh seluruh pejabat

dan staf di Markas Besar Polri. Di Mabes Polri pun perlu adanya pembagian tugas yang jelas dan sistim pengkoordinasiannya, baik horizontal, diagonal, maupun vertikal. Hubungan kerja Kapolri dengan Presiden, instansi pemerintah terkait, DPR media massa, tokoh dan organisasi kemasyarakatan, dengan luar negeri (Interpol, Aseanapol ataupun bilateral), memakan waktu yang banyak. Di samping tugas perumusan dan pembuatan kebijaksanaan (atau kebijakan) dan pemberian petunjuk teknis, petunjuk lapangan atau petunjuk pelaksanaan bagi kesatuan Polri di lapangan. Mabes Polri wajib pula melakukan koordinasi fungsional, baik operasional ataupun pembinaan. Hampir disemua negara dimana kepolisiannya merupakan kepolisian Nasional (*National Police*), markas besarnya hampir tidak pernah melaksanakan fungsi teknis operasional (melakukan tugas operasi sendiri). Kalau adapun terbatas pada fungsi reserse yang menyangkut kejahatan internasional atau transnasional, kejahatan yang mencakupi beberapa Polda dan kejahatan yang meresahkan masyarakat secara umum. Secara hirarkis dan Mabes sampai ke Polres, pada umumnya kesatuan atasan memberikan "back-up teknis" kepada

kesatuan bawahan agar pelaksanaan tugas Polri dikesatuan bawahan tersebut lebih berhasil guna. Tugas pokok dan fungsi-fungsi Polri bila dibandingkan dengan kepolisian dibanyak negara adalah luas sekali. karena itu pengorganisasiannya harus setepat mungkin. untuk kemudian diisi dengan pejabat Polri sesuai dengan jabatan, pangkat dan kemampuannya (lihat pasal 25 UU No. 2, 2002).

3. Pengorganisasian atau membuat struktur organisasi memang umumnya digambarkan dalam bagan organisasi (*organization chart*). Misalnya dalam organisasi Mabes Polri dewasa ini (Keppres 54 2001), dalam *organization chart* ada Sekretariat Jendral. *Functional chart* Sekretaris Jendral sedang *Personal Chartnya* Komjen Drs. Yuyun Mulyana. Setiap kotak dalam bagan organisasi berarti adanya beban kerja yang kontinyu. Jadi bukan hanya karena pentingnya fungsi yang bersangkutan. Kebijakan Kapolri Da'i Buchtiar "Hemat Struktur kaya fungsi", berarti fungsi-fungsi yang sejenis atau berkaitan bila beban kerja tidak full time atau kontinyu, sedapat mungkin digabungkan dalam satu struktur atau kotak organisasi (dua atau lebih fungsi dalam satu kotak). Pendekatan penyusunan organisasi disarankan

adalah pendekatan fungsional-struktural. Dalam kaitan ini perlu adanya *description* (rumusan) fungsi se jelas mungkin, diketahui beban kerjanya, agar dapat dikelompokkan dalam kotak bagan organisasi. Dengan demikian akan dapat diperkirakan pangkat dan kemanapun pejabat yang akan mengisi kotak tersebut. Keberhasilan organisasi memang tidak tergantung dan struktur organisasi. tapi dan kemampuan dan perilaku pejabat yang mengisi struktur tersebut. Namun, struktur yang tidak tepat akan mempunyai dampak negatif pada kinerja;

4. Polri tidak memiliki kecabangan seperti Angkatan Perang (TNI). TNI AD, misalnya, memiliki kecabangan (*corps*) Infanteri, Artileri, Kavaleri, Intendans, Ajen dan lain sebagainya, yang menggambarkan "spesialisasi" anggota-anggotanya. Walaupun demikian, sebagai kepolisian nasional yang modern, tidak berarti Polri tidak memiliki "spesialisasi". Untuk bidang operasional, sejak lama Menhankam Pangab dan Kapolri telah menyatakan kelemahan Polri dimasa sebelumnya. antara lain adalah karena lemahnya 'kemampuan teknis profesional khas kepolisian' yang seperti diuraikan di atas cukup luas dan Intelpol, Reserse, Sabhara (*general duty poice*), Polantas.

Brimob, Bimmas, Ditambah lagi dengan Polair, Poludara, Satwa kepolisian serta yang menyangkut teknologi kepolisian, dan laboratorium forensik, identifikasi forensik, kedokteran forensik, komplek Polri dan lain-lain. Prinsipnya menurut hirarki dari Mabes sampai dengan Polres, kemampuan teknis profesional pejabat pada unit organisasi yang lebih tinggi juga pejabat kesatuan bawahan, sebab bila tidak pemberian *back up* teknis tentu tidak mungkin kemampuan teknis profesional berjenjang berjalan baik.

5. Dalam kebijakan dan strategi Kapolri 2002 - 2004, ada pula dua hal yang perlu diperhatikan, pertama perlunya pembantu utama Kapolri yang mempunyai tugas, fungsi dan peran melakukan koordinasi dan pengendalian dalam menindak lanjuti kebijaksanaan Kapolri. Seperti diuraikan terdahulu, Kapolri akan sibuk sekali disamping tugas-tugas internal, juga tugas-tugas external Sekjen Polri, bila dibanding dengan Sekjen Departemen, adalah jabatan yang setingkat dengan Irjen dan Dirjen-Dirjen. Karena itu, adanya jabatan Wakapolri, seperti dalam Keputusan Pangab tahun 1997, perlu dipertimbangkan kembali.
6. Ada tiga alternatif dalam menyusun organisasi dan tata kerja Mabes Polri

yaitu "*directory system*", "*general staff system*" atau "*modified general staff system*". Keputusan Pangab tahun 1992 adalah *directory system*. Demikian pula Keppres 54, tahun 2001, sedangkan Keputusan Pangab tahun 1997 adalah "*general staff system*". Karena Kapolri Da'i Bachtiar menganggap penting penampilan tugas operasional dan Polisi Berseragam (*uniformed police*) dan Polisi tidak Berseragam (*plain clothed police*), maka organisasi waktu penulis menjabat Kapolri perlu dipertimbangkan. Waktu itu disamping adanya Staf Umum (*general staff system*) ada Danjen Komapta untuk *uniformed police* dan Danjen Koserse untuk *plain clothed police*. Sebutan dapat diganti menjadi Deputi atau lainnya. Dengan demikian Wakapolri, sekaligus merangkap menjadi "*Chief of Staff*" Kapolri. Dengan demikian hasil kerja Staf Umum akan merupakan "*complete staff work*". Anggota Staf Umum, para asisten KApolri secara fungsional mengkoordinasikan unit-unit pembinaan yang sesuai bidangnya. Dengan demikian, *span of control* Kapolri akan pendek, sebab yang langsung bertanggung jawab kepada Kapolri di Mabes adalah Wakapolri Irjen Polri 2 "Danjen" dan beberapa pejabat yang dianggap perlu. (lihat bagan 6). Bila



menganut *directory sistem* maka bagannya seperti bagan no.5.

7. Sesuai kebijaksanaan dan Strategi Kapolri, dalam dua tahun kedepan (2002-2004) seluruh Polres telah merupakan KOD yang andal, dengan memberi delegasi wewenang yang diperlukan untuk kelincahan pelaksanaan tugas Kapolres, Polda menjadi "*middle line*", mewakili Mabes dalam memimpin dan mengawasi pelaksanaan tugas Polres-Polres.
8. Struktur organisasi Polda dan Polres tentu tidak sama, karena keadaan daerah dan beban kerja yang berbeda-beda. Walaupun demikian, perlu ada pola struktur organisasi Polda dan Polres (lihat Departemen-Departemen sangat berbeda tugas pokok, fungsi dan beban kerjanya, namun pola organisasinya tidak berubah selama lebih 30 tahun sampai sekarang). Beda struktur organisasi Polda dan Polres-Polres akan terlihat dan tidak atau digabungkannya fungsi-fungsi dalam satu kotak struktur organisasi.

9. Dengan demikian, sesuai referensi peraturan perundang-undangan, visi, misi dan kebijaksanaan strategi Kapolri, maka struktur organisasi yang disarankan adalah bagan 6, yaitu "*modified general staff system*". Adapun mengenai pangkat Irtjen, "Danjen" dan lain-lain, perlu disesuaikan dengan pertimbangan yang matang.
10. Mengenai Tata Kerja pada tingkat Mabes Polri, adalah penjabaran dan "*formal organization*" pada bagan 6 dalam pola komunikasi dan koordinasi fungsional horizontal, diagonal dan vertikal intern Mabes, vertikal dengan Polda-Polda *upward* dan *downward*, serta *external* dengan instansi-instansi terkait di luar Polri.

#### IV. PENUTUP

Demikianlah secara ringkas saran ini, semoga dapat menjadi masukan dalam menyusun organisasi dan tata kerja Polri yang diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.

# IN MEMORIAM

Telah meninggal dengan tenang, kolega dan sahabat kami:

**Drs. Bakat Purwanto, SH, MM**

pada hari Minggu, 21 Juli 2002.

Semoga arwahnya diterima di Tuhan yang Maha Esa

Lahir	: 06 Juli 1955	Pendidikan Militer :	Umum :	
Agama	: Islam	AKABRI	SD	67
Suku	: Jawa	PTIK	SMP	70
TMT. JAB	: 01 - 06 - 2001	SESPIMPOL	SMA	73
PKT/NRP	: Brigjen Pol/55070510	SESPATI	S2 UI	90

Kecakapan Bahasa :	Pangkat :	TMT Pangkat :	Kejuruan :	
Bahasa Asing:	Letda Pol	01-12-1977	BHS. INGGRIS	78
Inggris Aktif	Lettu Pol	01-04-1980	BHS. INGGRIS	79
Bahasa Daerah:	Kapten Pol	01-10-1983	PA SERSE	80
Jawa Aktif	Mayor Pol	01-04-1987	PALAN SERSE	82
Banjar Aktif	Letkol Pol	01-10-1994		
	Kolonel Pol	01-01-2000		
	Brigjen Pol	01-08-2001		

## Riwayat Jabatan :

1978	KASAT SERSE RES BARITO SELATAN POLDA KALSEL
1979	KASAT SERSE POLRES BANJAR POLDA KALSEL
1982	KASAT SERSE RES BANJARMASIN POLDA KALSELTENG
1983	KABAG OPS POLRES HULU SUNGAI UTARA
1984	KASATGA OPS PUSKODAL OPS POLDA KALSELTENG
1985	KABAG BINOPS PUSKODAL OPS POLDA KALSELTENG
1988	KASUBBAG RENJARLAT PTIK
1991	KASAT SERSE POLRES METRO JAKTIM POLDA METRO JAYA
1993	WAKASAT SERSE EK DIT SERSE POLDA METRO JAYA
1993	STAF AHLI KAPOLRI
1994	PA BUNGKOL SPRI KAPOLRI
01-07-95	SES SPRI KAPOLRI
01-01-97	KAPOLRES METRO JAKBAR POLDA METRO JAYA
01-09-97	SESDIT SERSE POLDA METRO JAYA
01-11-99	GURU UTAMA FIK PTIK
01-06-2000	KASEBASA LEMDIKLAT POLRI
01-06-2001	DIR SERSE PIDKOR KORSERSE POLRI

## Tanda Jasa:

SL DWIJA SISTHA  
SL SETIA 16 TH

## Penugasan Ke Luar Negeri:

• Studi Banding Jepang	77
• Kunjungan Kerja ke Brunei	93
• Kunjungan Dk PBB USA	95